

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS  
PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PUTRI LESTARI**

**NPM: 1503100142**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

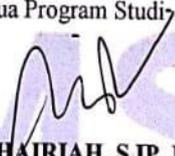
Nama : PUTRI LESTARI  
NPM : 1503100142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS  
PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing

  
**Drs. R. KUSNADI, M.AP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd**

DEKAN



  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : PUTRI LESTARI  
NPM : 1503100142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 Wib

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)  
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSB



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan ini saya, Putri Lestari. NPM 1503100142, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

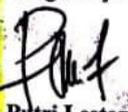
1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Maret 2019

Yang menyatakan,

  
  
Putri Lestari

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA**

**PUTRI LESTARI**

**NPM : 1503100142**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun kategorisasi yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah 1) adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan; 2) adanya pelaksanaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan; 3) adanya sumber daya dalam pelaksanaan; 4) adanya sasaran dan fasilitas kerja yang memadai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dibutuhkan perencanaan yang didasarkan pada tujuan pembangunan yang konsisten dan realistis, pengawasan kontiniu yang mencakup aspek fisik dan pembiayaan serta memiliki koordinasi yang baik, dan didukung dengan peningkatan sumber daya melalui Diklat yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Kemudian dalam mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dibutuhkan sarana dan fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kata kunci : Efektivitas pelaksanaan program pembangunan dapat dicapai, dibutuhkan perencanaan yang baik.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan tenggal waktu yang ditentukan. Shalawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan ummat yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara”*, disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara UMSU.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada orang – orang berhati mulia yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini ; Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Siti Hawa S.Pd, Ayahanda Ralidan S.Pd, terimakasih untuk limpahan kasih sayang, curahan semangat dan motivasi tiada henti selama ini. Menjadi motivator, dan tempat bersandar yang paling indah bagi penulis. Dan juga penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Agussani. M.AP selaku rector Univertsitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan/Program Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UMSU.
4. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu.
5. Bapak Drs. R. Kusnadi, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan juga menjadi bapak yang berhati mulia bagi penulis yang telah membimbing, memberikan saran, masukan serta motivasi yang sifatnya membangun dan menguatkan penulis sebelum dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Staff/Pegawai Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf tentunya penulis khaturkan kepada segenap Visitas Akademika FISIP UMSU atas kekurangan yang ada pada diri penulis.
7. Kepada Calon Imamku Ari Gunawan, Terima kasih untuk segalanya, rasa sayang, kepedulian, motivasi, dan juga canda tawa gembira yang selalu menghiasi hari – hari penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tanpa adanya rasa lelah.

8. Kepada rekan-rekan seperjuangan, stambuk 2015, terima kasih untuk kebersamaan dan kenangan indah yang kita lalui selama kurang lebih 3,5 tahun terakhir ini. Jika penulis banyak melakukan kesalahan, dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, dan terima kasih juga rekan-rekan yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada narasumber terima kasih atas bantuan sumber literturnya yang sangat membantu.

Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan maaf sebesar – besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya skripsi yang sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi yang membutuhkan.

Medan, Maret 2019

Penulis

**PUTRI LESTARI**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB IIURAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Konsepsi Efektivitas.....	9
2.2.1Pengertian Efektivitas Kerja.....	9
1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas.....	11
1.3 Ukuran Efektivitas.....	13
1.4 Indikator Efektivitas.....	14
2.2 Pengertian Pelaksanaan.....	15
2.3 Konsep Pembangunan.....	17
2.3.1 Definisi Pembangunan.....	17
2.3.2 Perencanaan Pembangunan.....	21

2.3.3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah.....	28
2.3.4 Kualitas Perencanaan Pembangunan .....	29
2.4 Konsepsi Jalan dan Jembatan.....	31
2.4.1 Pengertian Jalan .....	31
2.4.2 Dasar Hukum Jalan .....	32
2.4.3 Pengertian Jembatan .....	37
2.4.4 Tujuan Pembangunan Jalan dan Jembatan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Kerangka Konsep .....	41
3.3 Definisi Konsep .....	41
3.4 Kategorisasi .....	43
3.5 Informan/Narasumber.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	45
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	47
3.9.1 Gambaran Kabupaten Aceh Tenggara .....	47
3.9.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>

4.1 Hasil Penelitian.....	86
4.1.1 Deskripsi Narasumber .....	86
4.1.2 Hasil Wawancara .....	87
4.2 Pembahasan.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
5.1 Simpulan .....	106
5.2 Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Keadaan Narasumber Berdasarkan NIP, Pangkat/Gol, dan Jenis Kelamin.....	86
Table 4.2 Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Usia.....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul SKripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan suatu wilayah merupakan suatu hal yang penting terhadap perkembangan suatu wilayah. Seberapapun besar potensi suatu wilayah jika tidak ada pembangunan wilayah tersebut tetap tidak akan tersentuh dengan yang namanya perkembangan dan kemajuan. Hal yang utama dalam pembangunan suatu wilayah adalah berupa akses jalan. Sebab, jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan perekonomian suatu wilayah.

Anggaran pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara, Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan bahwa: "Penganggaran dalam rangka pelaksanaan

program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik). DAK dialokasikan untuk pemeliharaan berkala jalan sebesar minimal 70% dan peningkatan jalan sebesar maksimal 30%. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pembangunan jalan tidak dapat dibiayai dengan DAK. DAK infrastruktur jalan terutama dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang secara resmi berstatus jalan kabupaten/kota. Untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, Menteri Pekerjaan Umum membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis tingkat departemen, dan departemen menyediakan biaya khusus untuk kegiatan operasional tim-tim tersebut. Di tingkat provinsi, gubernur juga membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur Bappeda, dinas teknis terkait, dan satuan kerja pusat di daerah (Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan-P2JJ). Untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus, bupati/walikota membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur

Bappeda dan dinas terkait. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan jalan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum di atas, terdapat pasal tentang sanksi bagi penyelenggara Dana Alokasi Khusus yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dalam bentuk penilaian kinerja yang akan dituangkan dalam laporan menteri kepada Menteri keuangan, Menteri Negara PPN, Menteri Dalam Negeri, dan DPR. Untuk memberikan penilaian yang dimaksud menteri memerlukan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus setiap daerah penerima. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus dilakukan secara berjenjang oleh kepala SKPD, kepala daerah, dan menteri. Dalam Pasal 102 UU No. 33 Tahun 2004, memberi kewenangan kepada Menkeu untuk memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, termasuk DAK, kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi. Hal ini kemungkinan akan berakibat bahwa setiap penundaan penyaluran dana ke daerah berdampak pada terhambatnya perekonomian rakyat di daerah.

Masalah kurangnya dana masih menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran sesuai dengan rencananya. Di samping itu dana yang bersumber dari dalam negeri sangat terbatas. Untuk itu pinjaman luar negeri terutama yang bersifat pinjaman lunak, apabila masih diperlukan, dapat digunakan untuk menutup kekurangan sumber dari dalam negeri.

Untuk melaksanakan suatu rencana, maka diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut bukan saja dari sumber pemerintah, tetapi juga dari sumber masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pembangunan menurut apa yang telah direncanakan diperlukan peningkatan sumber-sumber dana dan menggunakannya secara lebih efisien.

Mengerucut pada permasalahan yang ada di Aceh Tenggara, dimana pembangunan jalan dan jembatan yang ada luput dari perhatian pemerintah. Banyak permasalahan yang timbul seperti naiknya tingkat kecelakaan yang terjadi akibat jalan yang rusak dan berlubang dan banyak jalan di wilayah Aceh Tenggara yang belum dapat diakses oleh warganya. Akibatnya warga Aceh Tenggara merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat.

Hal di atas membuktikan bahwa keberadaan infrastruktur yang rusak menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai salah satu badan pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik tentulah Dinas pekerjaan umum (PU) menjadi perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas, tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

Dinas Pekerjaan Umum juga memiliki masalah dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan. Alat berat merupakan masalah yang utama karena Dinas Pekerjaan Umum peralatan yang tersedia sangat minim dan tidak lengkap. Alat berat yang akan dipakai merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek, alat berat yang dipakai haruslah tepat pada fungsinya sehingga proyek dapat berjalan lancar.

Kesalahan dalam pemilihan alat berat dan ketersediaan alat yang tidak memadai dapat mengakibatkan manajemen pelaksanaan proyek menjadi tidak efektif dan efisien dengan demikian keterlambatan penyelesaian proyek dapat terjadi yang menyebabkan biaya akan membengkak dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama.

Masyarakat dalam aspirasinya mengharapkan kepada pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi dapat melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, dan perbaikan jalan dan jembatan yang telah rusak.

Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014,2010). Kebijakan pembangunan jalan dan jembatan telah diatur dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 69/PRT/M/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum, yang pada prinsipnya mengatur semua aspek lingkungan pada seluruh siklus

pembangunan proyek bidang Pekerjaan Umum, termasuk proyek Pembangunan jalan dan jembatan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka harus dirumuskan masalahnya terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya, sehingga jelas dari mana harus dimulai. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah bahan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara
- b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan instansinya dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Aceh Tenggara
- c. Untuk melatih dan menguji kemampuan berfikir penulis secara terfokus melalui pemikiran ilmiah, dan berusaha mengaplikasikan

teori-teori yang telah dipelajari dan di peroleh selama pelaksanaan perkuliahan terhadap praktek di lapangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang relevan tentang Efektivitas Kerja, Pelaksanaan dan Perencanaan, Pembangunan Jalan dan Jembatan

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, Kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroiti Nawawi (2005:39). Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman dasar berpikir dan berfungsi untuk mendukung analisa variabel-variabel yang diteliti. Menurut Nawawi (2005:40), sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroit masalah yang telah dipilihnya. Dalam penelitian ini, teori-teori yang dianggap relevan diantaranya adalah Efektivitas kerja, Pembangunan Jalan dan Jembatan.

#### **2.1 Konsepsi Efektivitas**

##### **2.2.1 Pengertian Efektivitas Kerja**

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Menurut Steers (1980:1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan cepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Mathis dan Jackson (2001:106), efektivitas didefinisikan sebagai merancang dan mengimplementasikan sekelompok kebijakan dan praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain: (a). Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu; (b). Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan; (c). Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program; (d). Mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Pengertian efektivitas menurut para ahli lainnya yakni: efektivitas menurut Siswanto (2006:62), berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut Handoko (1998:7), Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Siagian (2002:152) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namun pada umumnya setiap orang dalam melakukan

kegiatan tertentu menginginkan suatu hasil yang maksimal. Tetapi permasalahan efektivitas bukanlah sesederhana pengertian diatas, karena efektivitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu para ahli memberikan definisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dan pengertian efektivitas itu.

Dari beberapa uraian diatas, maka jelaslah bahwa efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang merupakan keberhasilan kerja yang baik dan benar. Dan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau arah yang tepat dalam arti mencapai suatu tujuan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghemat waktu dan dana seminimal mungkin. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu keseimbangan tujuan, alat dan tenaga serta waktu.

## **1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Steers dalam Siagian (2002:9), yaitu :

### **a). Karakteristik Organisasi**

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti di jumpai dalam

organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

b). Karakteristik Lingkungan

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan.

c). Karakteristik Pekerja

Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas. Karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

d). Karakteristik kebijaksanaan dan praktek manajemen

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

### **1.3 Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008:77), yaitu: a). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. b). Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai

dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarangapayang dikerjakanolehorganisasi dimasadepan. e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

#### **1.4Indikator Efektivitas**

Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator (1) Kejelasan tujuan program; (2) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program; (3) perumusan kebijakan program yang mantap; (4) penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan prasarana;

(6) Efektivitas operasional program; (7) Efektivitas fungsional program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran program; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

## **2.2 Pengertian Pelaksanaan**

Menurut Usman (2002: 70), bahwa Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syukur (1987: 40), Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,

dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: a). Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; b). Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; c). Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka

yang menjadi implementer program; d). Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: a). Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; b). Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; c). Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

## **2.3 Konsep Pembangunan**

### **2.3.1 Definisi Pembangunan**

Menurut Siagian (2014: 4), Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya,

menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoretisi dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsuhnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (*opinion leaders*) turut berperan daalm memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial. Bahkan rakyat jelata pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik

artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik. Pengertian dari “pemilihan alternatif yang sah” dalam definisi pembangunan diatas diartikan bahwasanya upaya pencapaian aspirasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang dapat diterima.

Menurut Bryant (1987: 22), bahwa pada dasarnya pembangunan mencakup pengertian menjadi dan mengerjakan. Perampasan, kesewenangan, kemelaratan, dimanapun itu terjadi semuanya menandakan keterbelakangan, dan sangat penting untuk mengerjakan hal-hal tertentu untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan yang sangat melarat dan terkuras, yang utama ialah mengerjakan sesuatu. Dengan demikian perhatian banyak tertuju pada perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan proyek dan program untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan rakyat. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *Pertama*, itu berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *Kedua*, ia mencakup “keadilan” (*equity*), perhatian yang gelap sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan

mengurangi kapasitasnya. *Ketiga*, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. Kapasitas apapun yang tercapai akan cepat punah, kecuali jika kita mengetahui dan menangani masalah-masalah kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber daya yang ada.

Dari sudut pandangan pembangunan, Menurut Riggs (1994: 76-77), bahwa kemampuan pemerintah membuat dan melaksanakan suatu keputusan mengubah lingkungannya, merupakan satu variabel tersendiri. Oleh karena itu pula kita tidak bisa mengatakan bahwa kemampuan semua pemerintah relatif sama. Jelas bahwa ada suatu pemerintah yang harus memikul beban terlalu berat di luar batas kemampuannya sehingga menjadikan usahanya gagal.

Berikanlah cara lain bila kita menghendaki agar pemerintah dapat melaksanakan program-program yang direncanakan guna menciptakan jaringan lalu lintas dan komunikasi, dan lain sebagainya. Mungkin kita temukan bahwa program-program tersebut hanya sedikit yang layak karena tidak adanya kemampuan pemerintah yang secara simultan saling memperkuat. Dengan kata lain, hal-hal yang telah diketahui secara luas seperti pembangunan politik, dan pembangunan

administrasi merupakan kondisi penting bagi keberhasilan administrasi proyek-proyek pembangunan tersebut. Tapi kenyatannya pemerintah dewasa ini kurang mampu melaksanakan proyek-proyek pembangunan termasuk di dalamnya adalah pemerintah yang telah membuktikan bahwa gagasan-gagasan administrasi modern ternyata tidak relevan dan tidak efektif.

### **2.3.2 Perencanaan Pembangunan**

Melalui perencanaan diharapkan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih efisien. Menurut Kunarjo (1993), bahwa Perencanaan yang baik mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut: (1). Didasari dengan tujuan pembangunan; (2). Konsisten dan Realistis; (3). Pengawasan yang kontinu; (4). Mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5). Memahami berbagai ciri hubungan antarvariabel ekonomi. (6). Mempunyai koordinasi yang baik.

#### **Didasari dengan Tujuan Pembangunan**

Tujuan pembangunan biasanya mencakup hal-hal pokok seperti: (a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b). Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat; (c). Meningkatkan kesempatan kerja; (d). Meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah.

#### **Konsisten dan Realistis**

Kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang disesuaikan dengan penerimaannya merupakan usaha untuk melaksanakan perencanaan yang lebih realistis.

### Pengawasan yang kontinu

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan adalah tiga unsur yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Perencanaan tanpa pengawasan akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang justru akan merugikan perencanaan itu sendiri.

### Mencakup Aspek Fisik dan Pembiayaan

Perencanaan tidak sekedar merencanakan pengeluaran uang, tetapi juga sasaran yang akan dicapai dengan sejumlah uang yang dikeluarkan. Kebutuhan fisik berupa kebutuhan prasarana seperti jalan dan jembatan. Kebutuhan tersebut perlu direncanakan secara konsisten dan menurut prioritas. Dengan biaya yang terbatas seorang perencana harus mampu untuk melakukan pilihan menurut skala prioritas dari kebutuhan fisik yang diperlukan.

### Memahami Berbagai Ciri Hubungan Antarvariabel Ekonomi

Perencanaan berarti pula membuat suatu proyeksi. Proyeksi merupakan hasil dari koordinasi beberapa variabel-variabel yang berkaitan, walaupun masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berlainan.

### Mempunyai Koordinasi Yang Baik

Maksud mengadakan koordinasi adalah untuk menghindari inkonsistensi antarkebijaksanaan, antarperencanaan dan pelaksanaan.

Koordinasi ini meliputi berbagai tingkat kegiatan baik perencanaan maupun kebijaksanaan.

Koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) sebagai arah kebijakan umum APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan mengacu pada: Program Pembangunan Daerah (Propeda); Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program. Untuk keperluan koordinasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota (Bappenas, 2003: 78).

Dengan perencanaan yang baik, pengeluaran-pengeluaran dapat diarahkan menuju ke sasaran yang lebih sistematis, konsisten, efisien dan efektif. Perencanaan adalah merupakan penunjuk jalan menuju ke pencapaian sasaran yang tentu saja keberhasilannya harus diikuti dengan kedisiplinan yang tinggi serta pengawasan yang memadai.

- a) Menurut Kunarjo (1993:9-10), berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi

menjadi:a) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam perencanaan jangka panjang ini sarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi hanya bisa dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan ditempuh. Jelas bahwa sasaran yang tercantum dalam GBNH hanya merupakan keinginan yang belum dijabarkan secara konkret tentang kuantitas yang akan dicapai dan lokasi pembangunan kegiatan yang bersangkutan.b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.c) Perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebut perencanaan operasional tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasaran dapat disajikan secara lebih konkret. Bintaro Tjokroamidjojo menyebutkan bahwa perencanaan operasional tahunan ini merupakan modifikasi cara *rolling plans*. *Rolling plan* adalah perencanaan yang pada tiap akhir tahun pelaksanaan, rencana dilakukan perubahan-perubahan serta penyesuaian-

penyesuaian kembali daripada perkiraan sasaran-sasaran dan proyek-proyek untuk rencana tahun-tahun berikutnya.

Perencanaan pembangunan meliputi lingkup regional atau daerah. Daerah dapat diartikan dari sudut politik maupun ekonomi. Dari sudut politik, daerah merupakan wilayah dalam suatu negara yang dibagi secara administratif. Dari sudut ekonom, daerah merupakan wilayah dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi alam, iklim, dan sebagainya.

Menurut Nurcholis (2005:114), bahwa Struktur politik di daerah (kabupaten/kota) tercermin dalam bentuk pemerintahan daerah otonom. pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Fungsi mengatur dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi mengurus dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal. Aktor yang terlibat terdiri dari pemerintah daerah terdiri Elected Official/Pejabat Politik (Kepala Daerah dan DPRD) dan Appointed Official (Birokrasi).

Perencanaan daerah sebagai bagian dari suatu negara dapat diartikan sebagai : (1). Perencanaan kota, daerah metropolitan atau wilayah yang mempunyai otoritas tersendiri, misalnya Otorita Jatiluhur, Otorita Batam; (2). Perencanaan yang meliputi beberapa daerah yang mempunyai kondisi hampir bersamaan; (3). Perencanaan

pembangunan proyek-proyek yang berlokasi di daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan pada masing-masing daerah tersebut.

Menurut Amirullah (2004), Kepala Daerah adalah pemimpin birokrasi daerah yang tugasnya menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD serta memimpin pelaksanaannya bersama dengan jajaran birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban antara lain: (1) menegakkan seluruh peraturan perundangundangan, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, (3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (4) mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD. Kepala Daerah ini berperan sebagai top manager, top manager bertanggung jawab terhadap perusahaan (pemerintah daerah) secara keseluruhan, dengan tugas utama yaitu menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Top manager lebih berperan dalam merumuskan perencanaan strategis, sedangkan birokrasi lebih berperan dalam perencanaan operasional. Legislatif adalah forum yang sangat penting dimana masalah masyarakat dan kebijakan di alamatkan kepadanya untuk diminta. Sebagian besar kebijakan yang dipersiapkan oleh eksekutif terutama yang bersifat makro atau mempunyai dampak bagi masyarakat, membutuhkan pengesahan dari legislatif..

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, dibedakannya dalam beberapa model yaitu:

1). *Planning Technical Bureaucratic*

Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

2). *Political Influence Planning*

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.

3). *Social Movement Planning*

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.

4). *Collaborative Planning*

Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling

pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

### **2.3.3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bersama: Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut Kunarjo (1993: 140), Pembangunan Daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh: (a). Pemerintah Pusat sebagai pelaksana asas dekosentrasi; (b). Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah

Tingkat II dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat tetapi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, misalnya proyek yang dibiayai oleh dana inpres. Dana inpres ini sifatnya merupakan bantuan kepada daerah untuk menunjang penyelenggaraan urusan yang sudah diserahkan kepada daerah. Biayanya termasuk dalam APBN pusat tetapi ditransfer ke dalam APBD. Perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan oleh aparat daerah.

Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah proyek Peningkatan Jalan Kabupaten.

Peningkatan jalan kabupaten ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan dan membangun jalan baru kabupaten atau kota madya dalam rangka memperlancar pengangkutan dan arus distribusi barang serta dalam rangka membuka daerah-daerah terisolasi.

Faktor-faktor strategis yang perlu diperhatikan untuk pengalokasian dana: (a). Panjang jalan; (b). Kondisi jalan (c). Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah; dan (d). Koreksi harga satuan untuk masing-masing wilayah.

#### **2.3.4**

#### **Kualitas**

#### **Perencanaan**

#### **Pembangunan**

Menurut Yamit (2010: 94), bahwa kualitas perencanaan yaitu: (a) Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, (c) Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Tujuan mengidentifikasi lima pendekatan perspektif kualitas yaitu: (a) Transcendental Approach, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur (b) Product Based Approach, adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, (c) User Based Approach, adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera (fitness for used) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi (d) Manufacturing Based Approach, adalah bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Menurut Keban (2010: 94), Untuk mengukur kualitas rencana Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para stake holders nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau

metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada.

Menurut Solihin (2008: 45), Perencanaan yang ideal harus memenuhi: (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system), (e) terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

## **2.4 Konsepsi Jalan dan Jembatan**

### **2.4.1 Pengertian Jalan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **2.4.2 Dasar hukum jalan**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dijelaskan bahwa :

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;

- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan bahwa :

- a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun dalam pasal 6 dinyatakan bahwa :

- a. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- b. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.

- c. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada pernyataan a dan pernyataan b meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- d. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada pernyataan a dan pernyataan b, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pernyataan a, wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada pernyataan b, dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada pernyataan d diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;

- b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d. Penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa, serta jalan kota. (Pasal 23)

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 meliputi:

- a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa.
- b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
- c. Tujuan Pembuatan Jalan

Menurut Arthur (2003: 77), tujuan utama pembuatan struktur jalan adalah untuk mengurangi tegangan atau tekanan akibat beban roda sehingga mencapai tingkat nilai yang dapat diterima oleh tanah yang menyokong struktur tersebut.

### **2.4.3 Pengertian jembatan**

Menurut Struyk (1995:1), Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, dimana rintangan ini biasanya jalan berupa lain yaitu jalan air atau jalan lalu lintas biasa.

Tipe jembatan mengalami perkembangan yang sejalan dengan sejarah peradaban manusia, dari tipe yang sederhana sampai dengan tipe yang kompleks, dengan material yang sederhana sampai dengan material yang modern. Jenis jembatan yang terus berkembang dan beraneka ragam mengakibatkan seorang perencana harus tepat memilih jenis jembatan yang sesuai dengan tempat tertentu.

Perencanaan sebuah jembatan menjadi hal yang penting, terutama dalam menentukan jenis jembatan apa yang tepat untuk dibangun ditempat tertentu dan metode pelaksanaan apa yang akan digunakan. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat dan aman, sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. Sehingga target 3T yaitu tepat mutu/kualitas, tepat biaya/kualitas dan tepat waktu sebagaimana ditetapkan, dapat tercapai.

Menurut Nugraha (2017) Jembatan adalah infrastruktur yang mengalami beban yang bersifat dinamis dan berulang. Efek dari sifat beban ini pada elemen jembatan khususnya elemen baja pada Jembatan tipe komposit adalah terjadinya siklus tegangan kemudian relaksasi secara berulang seiring kendaraan melintas selama masa

layan jembatan, yang dapat berakibat pada kegagalan fatik. Jembatan komposit yang direncanakan berdasarkan standar pembebanan jembatan SNI 1725:2016 dimana kondisi fatik ini dapat dievaluasi terhadap tahanan fatik nominal selama masa layan.

Menurut Arthur (2003: 248), Semua jembatan harus di inspeksi untuk pemeliharaan jembatan yang dilakukan tiap dua tahun sekali, sesuai dengan peraturan resmi mengenai Inspeksi jalan dan jembatan. Pengawas seharusnya memeriksa secara visual baik dari atas atau bawah. Beberapa kerusakan yang tampak seharusnya dilaporkan kepada insyur jembatan segera setelah dilihat, agar dengan segera para ahli dapat menangani kerusakan.

Menurut supriyadi (2000), Jembatan memiliki arti penting bagi setiap orang, dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda tiap orangnya. Jembatan bukan hanya kontuksiyang berfungsi menghubungkan suatu tempat ke tempat lain akibat terhalangnya suatu rintangan, namun jembatan merupakan suatu sistem tansfortasi, jika sistem runtuh maka sistem akan lumpuh.

#### **2.4.4 Tujuan Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Pembanguan jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014,2010). Kebijakan pembangunan jalan dan jembatan telah diatur dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

69/PRT/M/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum, yang pada prinsipnya mengatur semua aspek lingkungan pada seluruh siklus pembangunan proyek bidang Pekerjaan Umum, termasuk proyek Pembangunan jalan dan jembatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Kartiwa (2015: 14), Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Arti dari rasional dalam penelitian adalah penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, bukan hasil meditasi. Adapun arti empiris adalah kegiatan penelitian dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

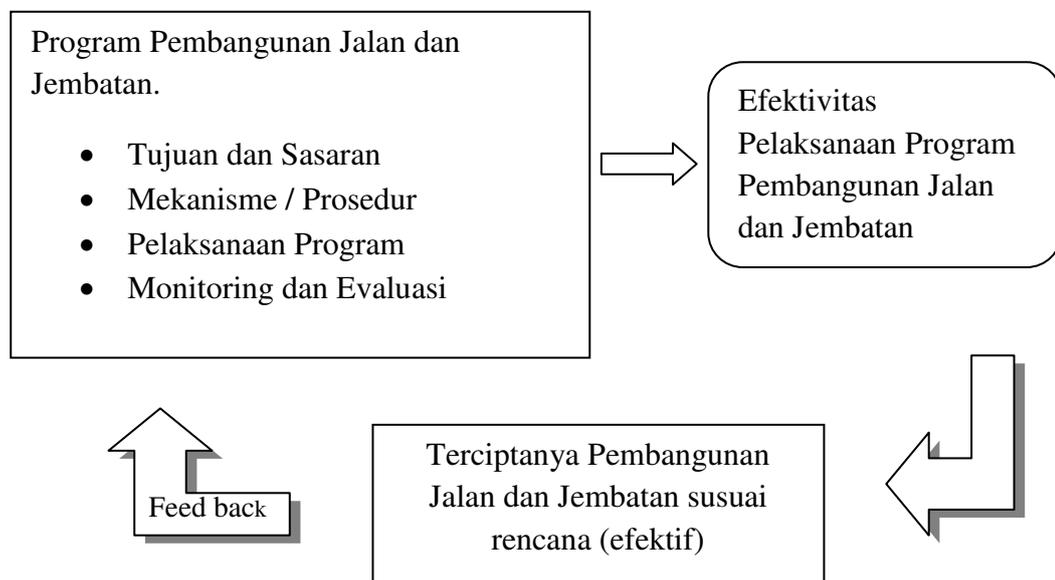
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian secara khusus yang dapat mempertimbangkan berbagai pendekatan terhadap objek yang akan diteliti, berdasarkan tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, variabel, tingkat eksplanasi, dan metode penelitian yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan cara penggambaran keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Kartiwa (2015:21), Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

Menurut Kartiwa (2015:30), Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

### 3.2 Kerangka Konsep



### 3.3 Definisi konsep

- a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau arah yang tepat dalam arti mencapai suatu tujuan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat

menghemat waktu dan dana seminimal mungkin. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu keseimbangan tujuan, alat dan tenaga serta waktu

- b. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.
- c. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).
- d. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- e.) Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan dan sasaran, yaitu tercapainya hasil dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tersebut.
- b. Adanya pelaksanaan yang dilakukan dinas pekerjaan umum sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
- c. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tersebut.
- d. Adanya sarana dan fasilitas kerja yang memadai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tersebut.

### **3.5 Informan/Narasumber**

Narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Dinas

- b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Informasi Publik
- c. Kepala Sub. Bagian Keuangan, Program, dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Bina Marga
- e. Pegawai Seksi Pembangunan Jalan
- f. Pegawai Seksi Pembangunan Jembatan

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas Pekerjaan Umum. Penelitian lapangan dilakukan untuk data dan informasi tentang objek penelitian, adapun cara pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- 1). Wawancara, Menurut Ali dalam Kartiwa (2015:113), Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1). Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- 2). Dokumentasi, Menurut Sedarmayanti dalam Kartiwa (2015:121), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

### **3.7 Teknik Analisis data**

Menurut Mikkelsen (2003:318), Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

Menurut Putra (2012:190), Untuk dilakukan analisis data, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data hasil pengamatan dan wawancara berupa catatan lapangan, catatan wawancara, dan catatan diskusi.
- b. Melakukan analisis pertama untuk memilah data kedalam kategori; kategori pertama terkait dengan penyempurnaan model, kategori kedua berkenaan dengan pemunculan perilaku HAM positif, kecakapan emosional, dan kreativitas.
- c. Melakukan analisis kedua di dalam masing-masing kategori; untuk kategori pertama analisis dilakukan untuk menemukan data pendukung bagi penyempurnaan model; untuk kategori kedua analisis dilakukan untuk memetakan kecenderungan perilaku HAM, kecakapan emosional, dan kreativitas yang muncul.
- d. Melakukan proses sintesis, yaitu mengolah keseluruhan data untuk merumuskan model akhir dan menentukan pola-pola perilaku HAM, kecakapan emosional, dan kreativitas yang muncul dalam proses pembelajaran.
- e. Pembuatan simpulan akhir.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

Waktu penelitian yaitu Januari - Februari 2019

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Gambaran Kabupaten Aceh Tenggara**

##### **a. Sejarah singkat Kabupaten Aceh Tenggara**

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Awal berdirinya Kabupaten Aceh Tenggara dimulai ketika pada tanggal 6 Desember 1957 terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min prapat hulu yang dihadiri oleh 60 pemuka adat Alas serta Gayo Lues, dan hasilnya adalah : 1). Ibukota Aceh Tengah di pindahkan dari Takengon ke Kutacane 2). Jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues dijadikan satu kabupaten yang tidak terlepas dari provinsi Aceh.

Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa di Kutacane yang dihadiri lebih dari 200.000 ribu orang. Akhirnya pada tanggal 26 Juni 1974 Kabupaten Aceh Tenggara diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud sebagai Kabupaten yang terlepas dari

Kabupaten Aceh Tengah, sekaligus diangkatlah Bupati pertama yakni (Alm) H. Syahadat.

Motto Kabupaten Aceh Tenggara adalah Satu Kata untuk Persatuan (Sepakat Segenap).

#### **b. Batas-batas wilayah**

Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Intem-intem dan Gayo Lues; sebelah selatan berbatasan dengan batas Bahbala Barat (Toba) dan Lau Baleng (Karo); sebelah timur berbatasan dengan Lokop dan Peureulak; sebelah barat berbatasan dengan Kleut (Singkil) dan Barus, dengan catatan bahwa Bahbala Barat, Leu Baleng, Lokop dan Bahorok masuk wilayah Tanah Alas dan Gayo Lues. Pada waktu itu, luas wilayah Tanah Alas dan Gayo lues adalah 10.487  $km^2$  (1.048.700 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak 12.400 jiwa. Sebelum pemekaran pada tahun 2002, luas wilayah kabupaten Aceh Tenggara adalah 9,635  $km^2$ . Setelah terjadi pemekaran wilayah dengan lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002, berdasarkan UU No.4/2002, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi 4.231,41  $km^2$  dengan sebagian besar wilayah berada di Lembah Alas.

#### **c. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tenggara**

Visi Kabupaten

Sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Aceh Tenggara maka visi Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara adalah “Terwujudnya Aceh Tenggara yang maju dan Bermartabat”.

Misi Kabupaten

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka misi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara adalah :

- 1) Mewujudkan Aparat Birokrat yang Bersih
- 2) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat
- 3) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
- 5) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 6) Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun dan Harmonis

### **3.9.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum**

#### **a. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum**

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang, kementerian atau departemen disertai tugas untuk menangani masalah perencanaan pembangunan infrastruktur menuju daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan aksesibilitas daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

KEP/150/A/KPTS/1996, maka pada tanggal 3 Desember 1966 ditetapkan sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Pembangunan daerah pada periode awal dimana disebutkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi kebijakan, pembangunan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **b. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban tugas umum pemerintah daerah di dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang kebinamargaan. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merumuskan gambaran implementasi tugas dan kewenangan tersebut kedalam bentuk Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebagai pendukung pilar-pilar Pembangunan. Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan berkelanjutan”

Adapun makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Visi diawali dengan menuju infrastruktur jalan, artinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh di dalam mengemban tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berusaha untuk mewujudkan kebutuhan layanan public terhadap infrastruktur jalan;
- 2) Nyaman, memiliki pengertian bahwa para pengguna sarana dan prasarana jalan di dalam menggunakan fasilitas tersebut memiliki rasa leluasa, baik keleluasaan ruang gerak maupun keleluasan dalam jarak;
- 3) Berkelanjutan, memiliki pengertian bahwa di dalam penyediaan infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh turut mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Misi dalam suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah pernyataan umum yang dirumuskan, tujuan inti atau falsafah dasar organisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sudah sedini mungkin menggagas sebuah misi yang aktual yang berlaku dan bersifat jangka panjang yang merupakan pernyataan untuk menjawab berbagai tantangan dimasa yang akan datang. Untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dalam visi perlu ditetapkan misi sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yaitu :

“Memenuhi kebutuhan Infrastruktur jalan secara profesional, partisipatif, dan transparan guna mewujudkan tata ruang Aceh yang nyaman dan berkualitas”

Misi ini dapat dicapai melalui:

- 1) Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantoran dan pengembangan sumber daya aparatur;
- 2) Menyiapkan perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan yang mampu memberikan pelayanan bagi transportasi barang, orang dan jasa yang baik dan lancar.

### **c. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum, penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dalam menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- 2) Membina dan memotivasi peningkatan kerja
- 3) Merumuskan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.
- 4) Mengkoordinasi kerjasama di bidang Pekerjaan Umum dengan instansi terkait.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kegiatan Pekerjaan Umum.

- 6) Memberi saran dan pertimbangan pada atasan dalam rangka mengatasi masalah di bidang Pekerjaan Umum Daerah.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun cara pencapaian tujuan yang merupakan strategi dari suatu organisasi Dinas Pekerjaan Umum untuk dapat merealisasikan tujuan, maka ditetapkanlah sasaran-sasaran dan prasarana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

#### **d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum**

Tugas Pokok :

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok antara lain:

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
- 2) Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) Pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**e. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas. Terdiri dari :
  - (a) Kasubbag Umum dan Informasi Publik
  - (b) Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana
  - (c) Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan
- 3) Bidang Program dan Bina Kontruksi. Terdiri dari :
  - (a) Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Jasa Kontruksi

- (b) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis
  - (c) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Bidang Bina Marga. Terdiri dari :
- (a) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan
  - (b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
  - (c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Bidang Cipta Karya. Terdiri dari :
- (a) Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum
  - (b) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - (c) Seksi Drainase, Air Bersih, dan Limbah
- 6) Bidang Penataan Ruang. Terdiri dari :
- (a) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
  - (b) Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang
  - (c) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang
- 7) Bidang Pengujian dan Peralatan. Terdiri dari :
- (a) Seksi Uji Bahan Kontruksi
  - (b) Seksi Peralatan dan Perbengkelan
  - (c) Seksi Uji Tanah dan Geoteknik

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tergambar pada halaman berikut ini :





**f. Tupoksi Dan Uraian Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum**

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (c) Pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (e) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- (f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian Jabatan Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- (a) Menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- (b) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
  - (c) Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - (d) Menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;
  - (e) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - (f) Menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
  - (g) Menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
  - (h) Menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan

program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- (b) Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- (c) Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- (d) Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian Jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) Mengordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- (b) Mengordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- (c) Mengordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- (d) Mengordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

a. Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- 3) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- 4) Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- 5) Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- 6) Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- 3) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- 4) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- 5) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
  - 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Kasubbag Umum dan Informasi Publik

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan informasi publik;

- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum;
- 3) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- 4) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- 5) Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- 6) Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- 7) Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 8) Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- 9) Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- 10) Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- 11) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Kasubbag Kepegawaian dan Tata Laksana

1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

2) Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;

3) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan, dan penyiapan rapat-rapat dinas;

4) Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

3) Bidang Bina Kontruksi, Bidang Program dan Bina Kontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan bina kontruksi. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana yang dimaksud di atas kepala bidang program dan bina konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang program dan bina konstruksi;
- (b) Pemberian petunjuk teknis di bidang bina konstruksi;
- (c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang program dan bina konstruksi;
- (d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang program dan bina konstruksi;
- (e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang program dan bina konstruksi
- (f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang program dan bina konstruksi;

Uraian Jabatan kepala bidang sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

- (a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- (b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang bina konstruksi;
- (c) Melakukan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang program dan bina konstruksi;
- (d) Melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang program dan bina konstruksi;

- (e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang program dan bina konstruksi
- (f) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan bidang program dan bina konstruksi;

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Bina Kontruksi dipimpin oleh seorang Kabid dibantu oleh 3 (tiga) orang seksi pegawai, yaitu:

- a. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan jasa Kontruksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Program dan Bina Kontruksi dalam pelaksanaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :
  - 1) Menyusun rencana kerja seksi pelaksanaan dan pembinaan jasa konstruksi;
  - 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada pembinaan jasa konstruksi
  - 3) Menyusun bahan pelaksanaan dan pembinaan jasa konstruksi
  - 4) Menyusun materi atau bahan pelatihan dan bimbingan teknis ke jasa konstruksi;
  - 5) Melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
  - 6) Merancang sistem informasi jasa konstruksi;

- 7) Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Seksi perencanaan teknis dan pengawasan teknis
- 1) Menyusun rencana kerja seksi perencanaan teknis dan pengawasan teknis;
  - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal perencanaan kegiatan pengawasan
  - 3) Melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - 4) Menyusun materi/bahan pelatihan dan bimbingan teknis ke jasa konstruksi;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan
- 1) Menyusun rencana kerja seksi data, evaluasi dan pelaporan;
  - 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada data, evaluasi dan pelaporan
  - 3) Merancang sistem informasi jasa konstruksi

- 4) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria ke jasa konstruksi;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 4) Bidang Bina Marga, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- (a) Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
  - (b) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
  - (c) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
  - (d) Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;

- (e) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- (f) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- (g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;
- (b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
- (c) Mengerjakan konstruksi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- (d) Menyusun dan merumuskan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;

- (e) Melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Bina marga dipimpin oleh seorang Kabid dibantu oleh 3 (tiga) orang seksi pegawai, yaitu.

- a. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga. Tugas pokok Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Kebinamrgaan;
  - 2) menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Preservasi Kebinamargaan;
  - 3) mengerjakan preservasi jalan dan jembatan;
  - 4) melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;

- 5) melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- 6) melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- 7) melakukan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- 8) melakukan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 3) Penyiapan pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 4) Penyiapan analisa penyusunan pedoman dan metode pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- 5) Penyiapan pertimbangan teknik dan operasional pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 6) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 7) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 5) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan PLP dan Air minum, penataan bangunan dan pengembangan lingkungan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :
- (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;

- (b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar pemukiman;
- (c) Pengembangan sistem penyediaan air minum lintas dalam daerah kabupaten
- (d) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
- (e) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
- (f) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
- (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Cipta Karya.

Uraian Jabatan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- (a) Menyusun rencana kerja Bidang Cipta Karya;
- (b) Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar pemukiman;
- (c) Mengembangkan sistem penyediaan air minum lintas dalam daerah kabupaten;
- (d) Melakukan Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
- (e) Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestic;

- (f) Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
- (g) Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Cipta Karya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kabid dibantu oleh 3 (tiga) orang seksi pegawai, yaitu:

a. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum

Seksi pelaksanaan PLP dan air minum yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang cipta karya. Meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pelaksanaan PLP dan Air minum;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pelaksanaan PLP dan air minum;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi penataan bangunan dan lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan,

pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi gedung. Dalam melaksanakan tugas meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi penataan bangunan dan lingkungan;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi penataan bangunan dan lingkungan;
- 3) Melakukan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan;
- 4) Melakukan penyelenggaraan bangunan gedung;
- 5) Memproses pemberian izin mendirikan bangunan;
- 6) Memproses pemberian izin mendirikan bangunan;
- 7) Melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

c. Seksi Drainase, Air bersih dan Air Limbah

- 1) Menyusun rencana kerja seksi drainase, air bersih dan air limbah;
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih;
- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;
- 4) Melakukan pengembangan system dan pengelolaan persampahan;

- 5) Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- 6) Bidang Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - (a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
  - (b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
  - (c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
  - (d) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitas kerjasama penataan ruang antar kecamatan
  - (e) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;

- (f) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- (g) Pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten;
- (h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian Jabatan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
- (b) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- (c) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- (d) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitas kerjasama penataan ruang antar kecamatan
- (e) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;

- (f) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- (g) Melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten;
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Seksi Pegawai, yaitu:

a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang. tugas pokok seksi sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang;

- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- 3) Merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- 4) Melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- 5) Melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- 6) Melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

b. Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang

Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang

tata ruang. Tugas pokok seksi sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan penataan ruang;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan dan penataan ruang;
- 3) Melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- 4) Memproses perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- 5) Melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- 6) Menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang. Tugas pokok seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- 2) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- 3) Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang ditingkat kabupaten;
- 4) Melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- 5) Melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;

- 6) Melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 7) Bidang Pengujian dan Peralatan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengujian dan peralatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- (a) Penyusunan rencana kerja bidang pengujian dan peralatan;
  - (b) Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan peralatan, perbekalan dan pengujian bahan;
  - (c) Penyusunan program kegiatan penggunaan peralata, perbekalan dan pengujian bahan;
  - (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penggunaan peralatan, perbekalan dan pengujian bahan;
  - (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian Jabatan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) Menyusun rencana kerja bidang pengujian dan peralatan;
- (b) Mengelola, mengendalikan dan mengawasi penggunaan peralatan, perbekalan dan pengujian bahan;
- (c) Menyusun program kegiatan penggunaan peralatan, perbekalan dan pengujian bahan;
- (d) Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penggunaan peralatan, perbekalan dan pengujian bahan;
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengujian dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Seksi Pegawai, yaitu:

a. Seksi Uji Bahan Kontruksi

- 1) Menyusun rencana kegiatan pengujian bahan jalan, jembatan dan kontruksi bangunan lainnya;
- 2) Menyusun rencana kebutuhan peralatan, suku cadang dan bahan uji laboratorium;
- 3) Melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan bahan uji laboratorium;

- 4) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium;
- 5) Melaksanakan penelitian dan pengambilan sampel;
- 6) Melaksanakan pengujian laboratorium jalan, jembatan dan konstruksi bangunan lainnya;
- 7) Melaporkan hasil uji laboratorium;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Peralatan dan Perbengkelan

- 1) Menyusun rencana kebutuhan peralatan, suku cadang peralatan, bahan bakar dan minyak pelumas;
- 2) Melaksanakan pengadaan peralatan dan perbekalan;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan;
- 4) Melaporkan secara berkala tentang kondisi peralatan dan penggunaannya;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik

- 1) Menyusun rencana kebutuhan pengujian tanah dan geoteknik;
- 2) Melaksanakan operasional peralatan;
- 3) Melaksanakan pelayanan umum penggunaan dan pemakaian peralatan;

- 4) Melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam;
- 5) Melaksanakan pengujian dan pengawasan tanah dan geoteknik;
- 6) Melaksanakan laporan dan evaluasi kondisi pengujian;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum berjumlah 66 Orang, yang terdiri atas :**

1) Kepala Dinas	: 1 orang
2) Sekretariat	: 4 orang
3) Bidang Program dan Bina Kontruksi	: 10 orang
4) Bidang Bina Marga	: 11 orang
5) Bidang Cipta Karya	: 11 orang
6) Bidang Penataan Ruang	: 10 orang
7) Bidang Pengujian dan Peralatan	: 19 orang
<hr/>	
Jumlah	: 66 orang

Adapun Jabatan, Pangkat, dan Usia pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana terlampir pada skripsi ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil penelitian di Dinas Pekerjaan Umum mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara.

#### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian di Dinas Pekerjaan Umum penulis uraikan tentang Deskripsi Narasumber dan Hasil Wawancara

##### 4.1.1 Deskripsi Narasumber

**Tabel 4.1**

**Keadaan Narasumber berdasarkan NIP, Pangkat/Gol, dan Jenis**

**Kelamin**

				Jenis
No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Kelamin
1.	H. RASYID EFENDI, ST. M.AP	19750402 2001 12 1 001	Pembina (IV/a)	Laki-laki
2.	HAMZAH FANSYURI, S.Kom	19800311 200701 1 012	Penata Muda TK-I (III/b)	Laki-laki
3.	YASSIR AMRI, SE	19760414 200504 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Laki-laki
4.	BAKRI, ST	19710503 200504 1 001	Pembina (IV/a)	Laki-laki
5.	JULISMAN, ST	19650731 200604 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Laki-laki

6.	SUJARJO, ST	19781024 200701 1009	Penata (III/c)	Laki-laki
----	-------------	-------------------------	----------------	-----------

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019

**Tabel 4.2**

**Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan, Pendidikan, dan Usia**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1.	H. RASYID EFENDI, ST. M.AP	PLT. KEPALA DINAS	Magister (S2)	44 Tahun
2.	HAMZAH FANSYURI, S.Kom	KASUBBAG UMUM DAN INFORMASI PUBLIK	Strata-1 (S1)	39 Tahun
3.	YASSIR AMRI, SE	KASSUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN	Strata-1 (S1)	43 Tahun
4.	BAKRI, ST	KABID. BINA MARGA	Strata-1 (S1)	48 Tahun
5.	JULISMAN, ST	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	Strata-1 (S1)	54 Tahun
6.	SUJARJO, ST	SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	Strata-1 (S1)	41 Tahun

Sumber : Hasil Penelitian 2019

**4.1.2 Hasil Wawancara**

Berikut ini adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi dengan menggunakan panduan wawancara, berdasarkan kategorisasi sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasid Efendi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan. Menurut beliau, dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, berpedoman kepada pembangunan jangka menengah dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain memperhatikan arahan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas PU juga memperhatikan identifikasi dan analisis permasalahan internal pada tubuh Dinas Pekerjaan Umum utamanya dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansyuri selaku Kasubbag Umum dan Informasi Publik. Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dalam menjabarkan tujuan menjadi ke dalam sasaran. Menurut beliau, adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yaitu: a). Tersedianya transportasi yang memadai; b). Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Tenggara; c). Melakukan persiapan dan penanganan gangguan infrastruktur akibat bencana; d). Memberikan pembinaan sistem pengelolaan data dan informasi kebinamargaan serta komunikasi publik; e). Mewujudkan aksesibilitas dan

konektivitas daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; d). Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dalam rangka keselarasan arah pembangunan.

Apakah pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Bapak Hamzah, Dalam menjabarkan tujuan ke dalam sasaran, dinas Pekerjaan Umum melakukan beberapa hal terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: a). Terpeliharanya kondisi kemantapan jalan yang sudah ada berada dalam kondisi baik dan sedang; b). Tertanganinya gangguan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana; c). Meningkatkan kualitas prasarana, sistem pengelolaan data, informasi jalan dan jembatan; d). Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi kondisi jalan dan jembatan; e). Meningkatkan kapasitas dan kinerja jasa konstruksi; d). Meningkatkan pembangunan drainase/gorong-gorong; dan e). Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. Berdasarkan SK Ruas Jalan Kabupaten Aceh Tenggara, luas jalan seluruh Kabupaten/kota ialah 1.600,82 km dan 1.129,82 km dari 16 Kecamatan. Dalam program Pembangunan Jalan dan Jembatan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai ialah 55%, sedangkan pembangunan jalan dan jembatan yang sangat baik itu ialah 85%. Menurut beliau, untuk mencapai kondisi jalan dan jembatan yang sangat baik, maka diperlukan

peralatan yang memadai seperti: sistem GPS, sistem ukur elektrik, dan menggunakan HRS satelit yaitu alat yang dapat langsung memantau kondisi/keadaan jalan dan jembatan. Sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum saat ini alat tersebut tidak tersedia, peralatan yang belum memadai dan tidak lengkap yang hanya ada sekitar 50% alat saja untuk pembangunan jalan dan jembatan, sehingga cukup sulit untuk mencapai 85% pembangunan jalan dan jembatan. Jika suatu Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dapat sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan harus adanya perencanaan, sebelum pelaksanaan dilakukan maka sistem perencanaan harus sudah ditentukan bagaimana pendapatan (*income*) dan pengeluaran (*output*). Misalnya, pelaksanaan pembangunan yang diinginkan selesai dalam jangka waktu tiga bulan, tetapi karena ada satu hal yang disebut *kahar* atau kejadian yang terjadi diluar dugaan dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat sistem penambahan waktu agar bisa terlaksanakannya pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai. Tetapi jika tidak ada kendala, maka tujuan dan sasaran dapat sesuai dengan yang ingin dicapai.

Bagaimana upaya menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Bapak Hamzah, Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan adalah dengan sistem penambahan waktu yaitu perpanjangan waktu untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan yang diinginkan.

- b. Adanya pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yassir Amri selaku Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan. Dengan pertanyaan, Apa saja rencana yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dan Bagaimana pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di DINas Pekerjaan Umum, telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut beliau, rencana yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, yaitu: Rencana pembangunan jalan yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, pembangunan jalan dan jembatan yang di danai dari Dana Otsus yang baru ada di tahun ini, dan ada yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari kabupaten.

Apakah pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan harapan masyarakat?”. Menurut bapak Yassir pembangunan jalan dan jembatan tidak dapat berpedoman pada apa yang diinginkan masyarakat, karena setiap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan surat keputusan (SK). Jika di dalam SK tersebut tidak ada perintah maka pembangunan tidak akan dilakukan karena kementerian tidak akan menanggapi. Terkecuali dari aspirasi DPR, mungkin jika ditujukan tempatnya, dan sesuai dengan prosedur maka akan dilakukan pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan aturan SK1 jalan yang akan diperbaiki terlebih dahulu ialah jalan yang sudah rusak berat dan selanjutnya

jalan yang rusak ringan, jika jalan memiliki kondisi yang baik dan sedang maka akan dianggap tetap baik, dan tidak dilakukan perbaikan.

Apa saja jenis pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai harapan masyarakat. Menurut Bapak Yassir, dalam mencapai harapan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum melakukan berbagai pelaksanaan, yaitu: jalan, jembatan, drainase, dan perumahan.

c. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakri selaku Kabid Bina Marga. Dengan pertanyaan, Bagaimana kondisi sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program. Menurut beliau, kondisi sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program untuk saat ini masih minim termasuk tekniknya masih kurang untuk pendukung program tersebut, karena sumber daya yang tersedia tidak mencapai 30%. Hal tersebut membuat pembangunan ditahun ini agak tersendat, karena di posisi saat ini banyak sumber daya yang tidak sinkron maksudnya banyak posisi pegawai yang tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka.

Bagaimana cara meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program. Menurut Bapak Bakri, cara yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya tersebut ialah dengan merekrut pegawai dari Dinas lain yang dapat bekerja dan sesuai dengan posisi yang seharusnya.

Pelatihan apakah yang diperlukan dalam meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program. Menurut Bapak Bakri, Dalam meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program Dinas pekerjaan umum melakukan pelatihan yaitu *Training Provider Since 1987* yaitu sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal guna menghadapi persaingan di era global yang sekarang semakin terasa dampaknya.

Bagaimana tingkat kinerja sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Menurut Bapak Bakri, tingkat kinerja sumber daya manusia saat ini dapat dikatakan cukup baik jika pekerjaan yang dilakukan sesuai di bidangnya masing-masing, tetapi saat ini cukup banyak sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka, sehingga memperlambat pelaksanaan pembangunan.

d. Adanya sarana dan fasilitas yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julisman selaku seksi pembangunan jalan. Dengan pertanyaan, Apa saja sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan. Menurut beliau, sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program ialah tersedianya alat pengukur terek/gps yang merupakan sistem informasi jalan yang dapat dilihat melalui online, alat ukur tembak yang disebut sohodka yaitu alat ukur jarak jauh, dan kereta trell yang akan digunakan jika pembangunan yang akan dilakukan memiliki jalan yang sempit dan sulit.

Bagaimana kondisi sarana dan fasilitas yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program. Menurut Bapak Julisman, kondisi sarana dan fasilitas di Dinas Pekerjaan Umum saat ini sangat minim dan tidak lengkap, banyak alat yang sudah tidak layak untuk di pakai, karena seiring berjalannya waktu alat yang dulunya masih lengkap, saat ini tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak.

Apa saja yang menjadi hambatan Dinas Pekerjaan Umum jika sarana dan fasilitas tidak memadai. Menurut Bapak Julisman, jika sarana dan fasilitas tidak memadai tentu saja dapat menghambat segala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan tidak akan tepat sararan karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujarjo selaku seksi pembangunan jembatan. Dengan Pertanyaan, Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja di Dinas Pekerjaan Umum. Menurut beliau, upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas di Dinas Pekerjaan Umum ialah dengan melakukan pengadaan barang-barang yang diperlukan, sebelumnya harus dapat persetujuan dari Bupati atau Sekda untuk mengamplopkan ke Dewan Pertimbangan Agung yang ada di Aceh Tenggara. Kemudian membuat pengajuan yang diperlukan.

## **4.2 Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan di bab 2.

Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut :

### **4.2.1 Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan**

Dari hasil wawancara tentang adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan menyatakan bahwa, dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, berpedoman kepada pembangunan jangka menengah dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain memperhatikan arahan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas PU juga memperhatikan identifikasi dan analisis permasalahan internal pada tubuh Dinas Pekerjaan Umum utamanya dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yaitu: a). Tersedianya transportasi yang memadai; b). Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Tenggara; c).

Melakukan persiapan dan penanganan gangguan infrastruktur akibat bencana; d). Memberikan pembinaan sistem pengelolaan data dan informasi kebinamargaan serta komunikasi publik; e). Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; d). Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dalam rangka keselarasan arah pembangunan. Dalam menjabarkan tujuan ke dalam sasaran, dinas Pekerjaan Umum melakukan beberapa hal terakait dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: a). Terpeliharanya kondisi kemantapan jalan yang sudah ada berada dalam kondisi baik dan sedang; b). Tertanganinya gangguan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana; c). Meningkatkan kualitas prasarana, sistem pengelolaan data, informasi jalan dan jembatan; d). Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi kondisi jalan dan jembatan; e). Meningkatkan kapasitas dan kinerja jasa konstruksi; d). Meningkatkan pembangunan drainase/gorong-gorong; dan e). Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. Berdasarkan SK Ruas Jalan Kabupaten Aceh Tenggara, luas jalan seluruh Kabupaten/kota ialah 1.600,82 km dan 1.129,82 km dari 16 Kecamatan. Dalam program Pembangunan Jalan dan Jembatan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai ialah 55%, sedangkan

pembangunan jalan dan jembatan yang sangat baik itu ialah 85%. Untuk mencapai kondisi jalan dan jembatan yang sangat baik, maka diperlukan peralatan yang memadai seperti: sistem GPS, sistem ukur elektrik, dan menggunakan HRS satelit yaitu alat yang dapat langsung memantau kondisi/keadaan jalan dan jembatan. Sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum saat ini alat tersebut tidak tersedia, peralatan yang belum memadai dan tidak lengkap yang hanya ada sekitar 50% alat saja untuk pembangunan jalan dan jembatan, sehingga cukup sulit untuk mencapai 85% pembangunan jalan dan jembatan. Jika suatu Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dapat sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan harus adanya perencanaan, sebelum pelaksanaan dilakukan maka sistem perencanaan harus sudah ditentukan bagaimana pendapatan (*income*) dan pengeluaran (*output*). Misalnya, pelaksanaan pembangunan yang diinginkan selesai dalam jangka waktu tiga bulan, tetapi karena ada satu hal yang disebut *kahar* atau kejadian yang terjadi diluar dugaan dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat sistem penambahan waktu agar bisa terlaksanakannya pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai. Tetapi jika tidak ada kendala, maka tujuan dan sasaran dapat sesuai dengan yang ingin dicapai. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan adalah dengan sistem penambahan waktu yaitu

perpanjangan waktu untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan tidak tercapai, karena pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang dapat dikatakan sangat baik harus dapat mencapai 85% sedangkan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara hanya mencapai 55%. Seharusnya, jika suatu tujuan yang ingin dicapai dapat sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan jalan jembatan harus melalui perencanaan.

Dari uraian tersebut diatas tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dapat di dasari dengan tujuan pembangunan, konsisten dan realistis, pengawasan kontinu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, memahami berbagai ciri hubungan antarvariabel, dan mempunyai koordinasi yang baik. Dengan perencanaan yang baik tersebut, maka tujuan dapat mengarah ke sasaran yang lebih sistematis, konsisten, efisien dan efektif.

#### **4.2.2 Adanya pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan**

Dari hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan

program pembangunan jalan dan jembatan, yaitu: Rencana pembangunan jalan yang di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, pembangunan jalan dan jembatan yang di danai dari Dana Otsus yang baru ada di tahun ini, dan ada yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari kabupaten. Pembangunan jalan dan jembatan tidak dapat berpedoman pada apa yang diinginkan masyarakat, karena setiap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan surat keputusan (SK). Jika di dalam SK tersebut tidak ada perintah maka pembangunan tidak akan dilakukan karena kementerian tidak akan menanggapi. Terkecuali dari aspirasi DPR, mungkin jika ditunjukan tempatnya, dan sesuai dengan prosedur maka akan dilakukan pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan aturan SK1 jalan yang akan diperbaiki terlebih dahulu ialah jalan yang sudah rusak berat dan selanjutnya jalan yang rusak ringan, jika jalan memiliki kondisi yang baik dan sedang maka akan dianggap tetap baik, dan tidak dilakukan perbaikan. Dalam mencapai harapan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum melakukan berbagai pelaksanaan, yaitu: jalan, jembatan, drainase, dan perumahan.

Dari hasil analisis penulis, pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, karena seringkali pembangunan yang dilakukan tidak selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut membuat harus adanya penambahan waktu.

Jika penambahan waktu dilakukan maka anggaran biaya akan semakin banyak dan jika pembangunan tidak diteruskan maka pembangunan akan terbengkalai dan tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum memilih untuk melakukan sistem penambahan waktu agar bisa terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan rencana pembangunan, harus dapat mengetahui faktor-faktor strategis yang perlu diperhatikan seperti panjang jalan, kondisi, jalan, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dan koreksi harga satuan untuk masing-masing wilayah. Agar dapat memberikan kualitas perencanaan pembangunan yang ideal maka masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum harus dapat bekerja sama, dengan memenuhi : (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem

yang dapat berkembang (a learning and adaptive system), (e) terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

#### **4.2.3 Adanya sumber daya dalam pelaksanaan program**

Dari hasil wawancara tentang adanya sumber daya dalam pelaksanaan program. Kondisi sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara untuk saat ini masih minim termasuk tekniknya masih kurang untuk pendukung program tersebut, karena sumber daya yang tersedia tidak mencapai 30%. Hal tersebut membuat pembangunan ditahun ini agak tersendat, karena di posisi saat ini banyak sumber daya yang tidak sinkron maksudnya banyak posisi pegawai yang tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya tersebut ialah dengan merekrut pegawai dari Dinas lain yang dapat bekerja dan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Dalam meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program Dinas pekerjaan umum melakukan pelatihan yaitu *Training Provider Since 1987* yaitu sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal guna menghadapi persaingan di era global yang sekarang semakin terasa dampaknya. Tingkat kinerja sumber daya manusia saat ini dapat dikatakan cukup baik jika pekerjaan yang dilakukan sesuai di bidangnya masing-masing, tetapi saat ini cukup banyak sumber daya

manusia yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka, sehingga memperlambat pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil analisis penulis, Sumber daya dalam pelaksanaan program masih sangat minim, terutama sumber daya manusia yang tersedia tidak mencapai 30%. Hal tersebut memberikan dampak ke arah negatif dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan. Berdasarkan dari uraian tersebut bahwa yang dapat dilakukan Dinas Pekerjaan Umum ialah memberikan pelatihan, tetapi pelatihan tersebut bukan hanya sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal, tetapi pelatihan tersebut harus diberikan kepada pemula secara selangkah demi selangkah, agar pekerja yang masih pemula dapat lebih memahami pekerjaan yang akan dilakukannya, karena banyak pegawai di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka, sehingga mereka dapat lebih mengetahui pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini, pelaksanaan pelatihan selengkapnya sebagaimana terlampir di skripsi ini. Agar dapat sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum, yaitu (1). Menteri memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personal dan keuangan pada kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2). Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian

orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan atau bantuan lainnya meliputi : perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk kesenjangan pembiayaan, penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penepatan target tahunan SPM, penilaian prestasi kerja pencapaian SPM, dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; (3). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan negara serta keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum memberikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum.

#### **4.2.4 Adanya sarana dan fasilitas yang memadai**

Dari hasil wawancara tentang adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program ialah tersedianya alat pengukur terek/gps yang merupakan sistem informasi jalan yang dapat dilihat

melalui online, alat ukur tembak yang disebut sohodka yaitu alat ukur jarak jauh, dan kereta trell yang akan digunakan jika pembangunan yang akan dilakukan memiliki jalan yang sempit dan sulit. Kondisi sarana dan fasilitas di Dinas Pekerjaan Umum saat ini sangat minim dan tidak lengkap, banyak alat yang sudah tidak layak untuk di pakai, karena seiring berjalannya waktu alat yang dulunya masih lengkap, saat ini tidak dapat digunakan lagi karena telah rusak. Jika sarana dan fasilitas tidak memadai tentu saja dapat menghambat segala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan tidak akan tepat sasaran karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas di Dinas Pekerjaan Umum ialah dengan melakukan pengadaan barang-barang yang diperlukan, sebelumnya harus dapat persetujuan dari Bupati atau Sekda untuk mengamplopkan ke Dewan Pertimbangan Agung yang ada di Aceh Tenggara. Kemudian membuat pengajuan yang diperlukan.

Dalam setiap pelaksanaan program harus adanya sarana dan fasilitas yang memadai sehingga program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dari hasil analisis penulis, sarana dan fasilitas yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara saat ini tidak lengkap, banyak alat berat yang sudah tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program agar berjalan efektif dan efisien harus sesuai. Dinas pekerjaan Umum harus dapat segera melengkapi segala fasilitas dan sarana yang belum ada, agar pelaksanaan pembangunan dapat dikerjakan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**5.1.1** Perencanaan dapat di dasari dengan tujuan pembangunan, konsisten dan realistis, pengawasan kontinu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, memahami berbagai ciri hubungan antarvariabel, dan mempunyai koordinasi yang baik. Dengan perencanaan yang baik tersebut, maka tujuan dapat mengarah ke sasaran yang lebih sistematis, konsisten, efisien dan efektif.

**5.1.2** Sebelum melaksanakan rencana pembangunan, harus dapat mengetahui faktor-faktor strategis yang perlu diperhatikan seperti panjang jalan, kondisi, jalan, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dan koreksi harga satuan untuk masing-masing wilayah. Agar dapat memberikan kualitas perencanaan pembangunan yang ideal maka masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum harus dapat bekerja sama, dengan memenuhi : (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung

sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system), (e) terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

**5.1.3** Sumber daya dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum memberikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum.

**5.1.4** Sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program agar berjalan efektif dan efisien harus sesuai. Dinas pekerjaan Umum harus dapat segera melengkapi segala fasilitas dan sarana yang belum ada, agar pelaksanaan pembangunan dapat dikerjakan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## **5.2 Saran**

Saran yang diberikan peneliti setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**5.2.1** Jika suatu tujuan yang ingin dicapai dapat sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan jalan jembatan harus melalui perencanaan. Perencanaan dapat di dasari dengan tujuan pembangunan, konsisten dan realistis, pengawasan kontinu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, memahami berbagai ciri hubungan antarvariabel, dan mempunyai koordinasi yang baik. Dengan perencanaan yang baik tersebut, maka tujuan dapat mengarah ke sasaran yang lebih sistematis, konsisten, efisien dan efektif.

**5.2.2** Masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum harus dapat bekerja sama agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan, dengan memenuhi : (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system), (e) terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

**5.2.3** Dinas Pekerjaan Umum harus dapat memberikan pelatihan secara selangkah demi selangkah, agar pekerja yang masih pemula dapat lebih memahami pekerjaan yang akan dilakukannya, karena banyak pegawai di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan jurusan sarjana mereka, sehingga mereka dapat lebih mengetahui pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini.

**5.2.4** Dinas pekerjaan Umum harus dapat segera melengkapi segala fasilitas dan sarana yang belum ada, agar pelaksanaan pembangunan dapat dikerjakan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handoko. T Hani. 1998. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Kartiwa. Asep. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Mikkelsen. Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mathis dan Jackson. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku kedua
- Nawawi. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Pers
- Nugraha. Widi. Januari-Juni 2017. *Evaluasi Umur Fatik Elemen Baja Jembatan Standar Tipe Komposit Menggunakan Data WIM (Pusat Litbang Jalan dan Jembatan)*, *Jurnal Jalan-Jembatan Vol. 34 No.1* 21-23.
- Nurdin. Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurcholis. Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Putra. Nusa. 2012. *Research And Development, Penelitian Dan Pengembangan Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Riggs. Fred W. 1994. *Administrasi Pembangunan, Batas-batas, Strategi Pembangunan, Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press

- Siagian. Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- . 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Siswanto. B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Steers. Dkk. 1980, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: PT. Erlangga
- Syukur, Abdullah, 1987, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Ujung Pandang, Persadi*
- Solihin. Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat
- White, Carolie Bryant Louise G, 1987, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, LP3ES
- Wignall. Dkk. 2003. *Proyek Jalan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Yamit. Zulian. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonesia

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : PUTRI LESTARI

Tempat/Tgl. Lahir : Blangkejeren, 10 Oktober 1997

NPM : 1503100142

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Ayah : Ralidan S.Pd

Nama Ibu : Siti Hawa S.Pd

Alamat : Kuning 1 Kutacane, Aceh Tenggara

Pendidikan

1. Tahun 2009, Tamat dari SD Negeri 2 kuning
2. Tahun 2012, Tamat dari MTs Negeri Kutacane
3. Tahun 2015, Tamat dari SMA Negeri 1 Kutacane
4. Tahun 2015, Tercatat sebagai Mahasiswi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S-1) di Universitas Muhammadiyah Sumtera Utara Medan.

Karya Tulis Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dan dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Februari 2019

Penulis

Putri Lestari

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara

Nama : Putri Lestari

Npm : 1503100142

Daftar Pertanyaan

**a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan**

1. Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan ?
2. Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dalam menjabarkan tujuan menjadi atau ke dalam sasaran ?
3. Apakah pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ?
4. Bagaimana upaya menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan ?

**b. Adanya pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan**

1. Apa saja rencana yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan ?

2. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara, telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ?
3. Apakah ada pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan harapan masyarakat ?
4. Apa saja jenis pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai harapan masyarakat ?

**c. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan program**

1. Bagaimana kondisi sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program ?
2. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program ?
3. Pelatihan apakah yang diperlukan dalam meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program ?
4. Bagaimana tingkat kinerja sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ?

**d. Adanya sarana dan fasilitas yang memadai**

1. Apa saja sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan ?
2. Bagaimana kondisi sarana dan fasilitas yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan program ?

3. Apa saja yang menjadi hambatan Dinas Pekerjaan Umum jika sarana dan fasilitas tidak memadai ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sarana dan fasilitas kerja di Dinas Pekerjaan Umum ?



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
menjawab surat ini agar disebutkan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610451 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan TAN  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 01 Desember 2018.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI LESTARI  
N P M : 1503100142  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,165

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum Aceh Tenggara	<i>Put</i>
2	Upaya dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigran dalam penanggulangan kemiskinan Di Aceh Tenggara	
3	Kontribusi Camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan fisik di kecamatan Babel Aceh Tenggara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 01 Desember 2018.

Ketua,

Pemohon,

(PUTRI LESTARI)

Pembimbing K. Kandi

10.019



Engage, Create & Inspire

Sila perhatikan Surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.019/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **01 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **PUTRI LESTARI**  
N P M : 1503100142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM ACEH  
TENGGERA**  
Pembimbing : Drs. R. KUSNADI, M.A.P.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 25 Rabiul Awwal 1440 H  
03 Desember 2018 M

Dekan  
  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul Kualitas & Integritas  
Bisa menjawab sumpah di atas dengan luhur  
nilai dan lantang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muhtar Basri No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 8224387 - (061) 8210451 Ext. 200-201 Fax. (061) 8225074  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 29 Desember 2018.

*Assalamu 'alaikum wa. wa.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI LESTARI  
NPM : 1505100142  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. (0.04/SK/ILM/UMSU-03/F/2018) tanggal 01 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM  
ACEH TENGGARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:  
Pembimbing

(Drs. R. Kurnia, M.A.P.)

Pemohon

(Putri Lestari)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 01/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/FF/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019  
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai  
 Tempat : LAB. FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	SINDI WIRANDA	1503100152	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SDN 2 BLANG NISAM ACEH TIMUR
7	DELI MUSTIKA DEVI	1503100004	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
8	ANIS MARSELLA	1503100039	Drs. BANGUN NAPITUPULLI, M.Si	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI DINAS TENAGA KERJA SIMALUNGUN
9	AHMAT FAUZY	1503100129	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI GUNUNG KELAMBU KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
10	PUTRI LESTARI	1503100142	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H  
02 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 384/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai  
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NONA SINTIA	1503100075	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
2	EVANGELISTA PARDEDE	1503100097	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
3	MAULIDA ULFA	1503100006	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
4	PUTRI LESTARI	1503100142	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA
5	RAFIKA DURI	1503100053	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA

Notulis Sidang :

Ditetapkan oleh :



Dr. N. Hamzah Arifin, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 04 Rabab 1440 H  
 11 Maret 2019 M

Penitia Ujian



Sekretaris

Drs. ZULFAUMI, M.I.Kom



Silta mensawab kumit in agar disebutan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 045/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019      Medan,      12 Djumadil Awwal 1440 H  
Lampiran : --      18 Januari      2019 M  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Kepada : **Yth, Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Aceh Tenggara**  
di-  
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **PUTRI LESTARI**  
N P M : 1503100142  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM  
ACEH TENGGARA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

**Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.**

Cc : File.